



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2019/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Itsbat Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Kastalani bin Jahri, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Desa Berangas Tengah, RT.03, Kecamatan Alalak, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, disebut **Pemohon I**;

Majidah binti Syahril, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Berangas Tengah, RT.03, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 6 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 141/Pdt.P/2019/PA.Mrb, tanggal 6 September 2019, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2014, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Pulau Sewangi Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, penghulu yang menikahkan bernama Guru Usai, dan pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi;

Hlm. **1** dari **13**
Penetapan 141/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syahril;
Saksi nikahnya masing-masing bernama:
 1. Masri;
 2. H. Baslan;Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dengan usia 40 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dengan dengan usia 36 tahun;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut agama Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 anak yang bernama Haidar Pahmi bin Kastalani, lahir tanggal 04 April 2016;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki kutipan akta nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk melengkapi persyaratan administrasi membuat akta kelahiran anak para Pemohon, dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan para Pemohon;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hlm. 2 dari 13
Penetapan 141/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Kastalani bin Jahri**) dan Pemohon II (**Majidah binti Syahril**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2014 di Desa Pulau Sewangi Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa sehubungan dengan adanya perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Marabahan telah mengumumkannya pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Marabahan selama 14 hari, dengan Surat Nomor : 141/Pdt.P/2019/PA.Mrb tanggal 06 September 2019, sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Marabahan sehubungan dengan permohonan Istbat Nikah tersebut;

Bahwa kemudian Hakim memeriksa identitas para Pemohon, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kastalani, NIK 6304050707740003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal 02 Januari 2013. Bukti surat

Hlm. **3** dari **13**
Penetapan 141/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Majidah, NIK 6304055703780001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal 16 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Kastalani bin Jahri, Nomor 6304052903160002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tertanggal tanggal 07 Nopember 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;

B. Saksi :

1. Muhammad Ali bin Mardan, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Berangas Tengah RT.04 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa mengenal para Pemohon sebagai suami isteri, yang menikah beberapa tahun lalu di rumah orang tua Pemohon II di Desa Pulau Sewangi, Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa saksi tidak hadir dan menyaksikan sendiri pada saat para Pemohon melangsungkan akad nikah, saksi hanya hadir pada saat acara resepsi (pesta perkawinan) para Pemohon, saksi juga tidak mengetahui siapa yang menikahkan para Pemohon, dan menurut keterangan para Pemohon yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sendiri bernama Syahril;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon, namun menurut keterangan para Pemohon pernikahan tersebut disaksikan oleh banyak orang yang hadir;

Hlm. 4 dari 13
Penetapan 141/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mahar (mas kawin) yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
 - Bahwa sewaktu melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sepersusuan atau hubungan lainnya yang bisa menjadi penghalang untuk menikah, baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atau meragukan terhadap pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon selama pernikahan telah hidup rukun sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai serta keduanya tetap beragama Islam (tidak pernah murtad);
 - Bahwa selama masa pernikahan Pemohon I tidak ada lagi mempunyai isteri lain selain Pemohon II, dan saat ini keduanya telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum dan melengkapi persyaratan pembuatan kutipan akta nikah di Kantor Urusan Agama serta untuk membuat akta kelahiran anak para Pemohon;
2. Ismail bin Salman, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Berangas Tengah RT.01 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi berteman sudah cukup lama dengan para Pemohon;
 - Bahwa mengenal para Pemohon sebagai suami isteri, yang menikah pada tahun 2014 di Desa Pulau Sewangi, Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

Hlm. 5 dari 13
Penetapan 141/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir dan menyaksikan sendiri pada saat para Pemohon melangsungkan akad nikah, namun saksi mendapat informasi dari para Pemohon dan orang-orang yang hadir, dan menurut keterangan para Pemohon yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Syahril;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mahar (mas kawin) yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
 - Bahwa sewaktu melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sepersusuan atau hubungan lainnya yang bisa menjadi penghalang untuk menikah, baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atau meragukan terhadap pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon selama pernikahan telah hidup rukun sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai serta keduanya tetap beragama Islam (tidak pernah murtad);
 - Bahwa selama masa pernikahan Pemohon I tidak ada lagi mempunyai isteri lain selain Pemohon II, dan saat ini keduanya telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum dan melengkapi persyaratan pembuatan kutipan akta nikah di Kantor Urusan Agama serta untuk membuat akta kelahiran anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Hlm. **6** dari **13**
Penetapan 141/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon kemudian menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, para Pemohon pada pokoknya telah mendalilkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Desa Pulau Sewangi, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Syahril, dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan pernikahan tersebut tidak terdaftar/tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, sehingga Pemohon I dan Pemohon II minta agar disahkan perkawinannya agar memperoleh kepastian hukum dan untuk melengkapi persyaratan administrasi membuat akta kelahiran anak para Pemohon serta untuk memenuhi hak-hak keperdataan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan secara Syari'at Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, maka para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai yang berkenaan dengan beberapa hal, diantaranya adalah dalam huruf (e), yaitu Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya maksud dan tujuan permohonan para Pemohon yang

Hlm. 7 dari 13
Penetapan 141/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta disahkan pernikahannya untuk memperoleh pengakuan hukum, tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II tahun 2014 angka (11) halaman 145 Permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan tanggal 06 September 2019 dan terhitung sejak tanggal tersebut sampai 14 hari kemudian tidak ada pihak-pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat (bertanda P.1 - P.3). Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 301 ayat (1) dan (2) Rbg *jis* Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan oleh para Pemohon, telah membuktikan kebenaran identitas para Pemohon dan keduanya beragama Islam serta bertempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.3 telah menerangkan Pemohon I dan Pemohon II telah terdaftar/tercatat sebagai satu keluarga dan mempunyai hubungan perkawinan serta tinggal bersama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa pada masing-masing bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon tersebut pada pokoknya terkandung maksud atau tujuan dikeluarkannya bukti-bukti surat tersebut. Dengan demikian bukti-surat surat tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat, dan isinya tidak pula dibantah oleh para Pemohon, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan

Hlm. **8** dari **13**
Penetapan 141/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon di persidangan, yang memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah menurut tata cara agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon tentang terjadinya peristiwa pernikahan para Pemohon hanya berasal dari keterangan para Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu* namun dalam keterangan saksi-saksi tersebut terdapat adanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa para Pemohon benar telah melangsungkan pernikahan secara Syariat Agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yakni dari keterangan para Pemohon, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terungkap bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara Syari'at Islam pada tanggal 22 Desember 2014 di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Desa Pulau Sewangi, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa pelaksanaan dan tata cara pernikahan tersebut seharusnya dilakukan menurut ketentuan Hukum/Syari'at Agama Islam, sehingga bersesuaian dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, terungkap bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I beragama Islam dan berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II juga beragama Islam dan berstatus perawan, keduanya tidak berada dalam ikatan pertunangan atau pernikahan dengan orang lain, serta antara keduanya tidak ada hubungan darah dan sepersusuan ataupun hubungan lain yang dapat menjadi penghalang dalam pernikahan, sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara para

Hlm. 9 dari 13
Penetapan 141/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam, serta sejiwa dengan firman Allah SWT. yang terdapat dalam Al Qur'an Surah An Nisa ayat 23;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan, terbukti yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II dalam pernikahan para Pemohon adalah wali nasab, yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Syahril, oleh karenanya pernikahan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah disaksikan setidaknya oleh 2 orang saksi laki-laki, yang hadir dan menyaksikan secara langsung pelaksanaan akad nikah antara Pemohon I dan wali Pemohon II, sehingga pernikahan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 24, 25 dan 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, wali nikah Pemohon II yang berwakil kepada seseorang penghulu dan Pemohon I telah mengucapkan ijab qabul secara pribadi dalam satu majelis (*ittihad al majlis*), sehingga pernikahan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan 29 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah Pemohon I telah menyerahkan mahar berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai kepada Pemohon II, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 30, 32 dan 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta persidangan menyebutkan terhitung sejak menikah para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai, keduanya tetap beragama Islam (tidak pernah murtad) dan sampai sekarang tidak pernah ada pihak-pihak yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan mereka;

Hlm. **10** dari **13**
Penetapan 141/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah agar memperoleh kepastian hukum dan untuk melengkapi persyaratan administrasi membuat akta kelahiran anak para Pemohon serta untuk memenuhi hak-hak keperdataan para Pemohon, oleh karena itu kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon telah dilakukan secara Syari'at Islam, dan telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan dalam Hukum/Agama Islam serta tidak adanya halangan atau larangan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan, maka Hakim berkesimpulan pernikahan para Pemohon dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa Hakim merasa perlu pula mengetengahkan pendapat Ulama sebagai berikut :

- Dalam kitab *I'anatut Thalibin* IV hal 254 yang berbunyi :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو
ولي وشاهدى عدول**

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* hal 298 yang berbunyi :

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والارث

Artinya : "Jika ada baginya saksi-saksi yang menyatakan/menerangkan sesuai dengan permohonan, maka tetaplah (sah) pernikahannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan hukum Syar'i maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, dengan demikian permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 Ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Hlm. **11** dari **13**
Penetapan 141/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 20019 Tentang Pencatatan Perkawinan menentukan bahwa pencatatan perkawinan berdasarkan itsbat nikah dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama, oleh karena itu diperintahkan kepada para Pemohon untuk untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Kastalani bin Jahri**) dengan Pemohon II (**Majidah binti Syahril**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2014 di Desa Pulau Sewangi Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada para Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1441 Hijriah oleh **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.** Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh **Norsasi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hlm. **12** dari **13**
Penetapan 141/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Norsasi

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Leges	: Rp 10.000,00
4. Panggilan	: Rp 120.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hlm. **13** dari **13**
Penetapan 141/Pdt.P/2019/PA.Mrb